

RINGKASAN EKSEKUTIF
Strategic Environmental and Social Assessment(SESA)
BioCarbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscapes –
Jambi Sustainable Landscape Management Project
(BioCF ISFL – JSLMP)

Inisiatif Dana Biokarbon untuk Lanskap Hutan Berkelanjutan (BioCF-ISFL) adalah dana multilateral, didukung oleh pemerintah donor dan dikelola oleh Bank Dunia. Tujuan utama dari BioCF-ISFL adalah mempromosikan pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor lahan, deforestasi dan degradasi hutan di negara berkembang (REDD+), dan dari pertanian berkelanjutan, serta perencanaan, kebijakan, dan praktik penggunaan lahan yang lebih cerdas. BioCF-ISFL telah memberikan hibah kepada Pemerintah Indonesia (GOI) untuk mendukung persiapan implementasi REDD+ (Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan).

Program Pengurangan Emisi (selanjutnya disebut ERP) akan memajukan implementasi REDD+ di tingkat nasional, dan dengan demikian berkontribusi pada pencapaian pengurangan emisi yang signifikan secara nasional dan internasional. Program ini juga diharapkan dapat membantu Indonesia dalam mencapai target ketahanan iklim dan komitmen internasionalnya. ERP dibangun di atas komitmen substansial Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Provinsi Jambi untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.

Tujuan ERP untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan di daerah yang meliputi sebutan hutan, kawasan hutan (tutupan hutan di daerah penggunaan lain atau *di Area Penggunaan Lain / APL*), dan lahan gambut. Sekitar setengah dari kawasan hutan di Jambi ditutupi oleh hutan tropis, yang merupakan rumah bagi kekayaan keanekaragaman hayati yang signifikan secara global (termasuk spesies yang terancam punah seperti harimau, gajah dan orangutan) dan mendukung banyak masyarakat adat dan lokal lainnya. Lebih dari 20 persen hutan Jambi yang tersisa hilang dalam kurun waktu 1990 hingga 2015, dan ini terutama disebabkan oleh ekspansi perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman, hutan tanaman, dan pertambangan, serta oleh penggerak lainnya.

Untuk mengurangi risiko dan memitigasi dampak negative yang timbul akibat implementasi ERP, maka diperlukan Penilaian Strategis Lingkungan dan Sosial (*Strategic Environmental and Social Assessment - SESA*). Tujuan utama dari proses SESA adalah mengidentifikasi implikasi lingkungan dan sosial dari pelaksanaan rencana, kebijakan dan program yang diusulkan di bawah J-SLMP dan diikuti oleh ERP. Analisis risiko dan dampak dilakukan sebagai latihan deliberatif berdasarkan konsultasi pemangku kepentingan dan perumusan isu-isu strategis seperti di atas. Rencana, kebijakan dan intervensi yang diusulkan di bawah ERP diperiksa berdasarkan risiko kontekstual berdasarkan hasil konsultasi dengan pemangku kepentingan dan analisis data spasial. Proses SESA akan dilakukan dalam dua tahap. Untuk SESA Tahap 1, fokusnya adalah pada kesiapan REDD+ di tingkat nasional dan di Provinsi Jambi. SESA Fase 2 akan memasukkan penilaian di Provinsi Jambi, yang saat ini sedang diusulkan oleh Pemerintah Indonesia untuk Dana Biokarbon ISFL.

Laporan ini didasarkan pada kedua fase KLHS untuk Provinsi Jambi. SESA Tahap 2 untuk Provinsi Jambi akan dikembangkan secara paralel dengan persiapan ERP provinsi dan disajikan dalam kerangka waktu yang terpisah. Konsultasi lebih lanjut akan dilakukan dengan para pemangku kepentingan di atas khususnya sektor swasta untuk mendapatkan informasi terbaru tentang peran mereka dalam pengurangan emisi dan implementasi kerangka pengaman. Informasi ini akan digunakan untuk menyempurnakan dokumen SESA dan ESMF yang sedang disiapkan untuk tahap ERP.

SESA merupakan dokumen yang selaras dengan kerangka pengembangan KLHS untuk Provinsi Jambi selaras dengan *Peraturan Pemerintah (PP) No. 46/2016* tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Meskipun tidak ada satu cara atau metode tunggal untuk melakukan SESA, telah disepakati bahwa di bawah ERP, keseluruhan proses SESA harus mencakup elemen-elemen berikut:

- Proses konsultatif diagnostik berulang dan analitik tentang aspek sosial-ekonomi, lingkungan dan sosial dari kesiapan REDD+, termasuk menilai kapasitas dan kesenjangan yang ada untuk mengatasi masalah lingkungan dan sosial yang teridentifikasi;
- Konsultasi dengan pemangku kepentingan yang berbeda, mengidentifikasi berbagai pandangan, persepsi dan kekhawatiran, serta mengidentifikasi pengecualian pemangku kepentingan yang relevan selama persiapan ERP; dan
- Identifikasi langkah-langkah mitigasi yang relevan untuk mengatasi masalah lingkungan dan sosial yang teridentifikasi, serta pengaturan kelembagaan provinsi dan kabupaten untuk menangani upaya perlindungan.

Catatan dari proses konsultasi menunjukkan bahwa pemangku kepentingan utama terlibat dalam diskusi. Pemangku kepentingan utama ini adalah mereka yang memiliki pengaruh dan minat tinggi pada ERP. Selain itu, pemangku kepentingan ini juga mewakili mereka yang mempengaruhi ERP (misalnya, pemerintah pusat dan daerah, LSM, Dewan Adat), serta mereka yang terkena dampak ERP (misalnya, masyarakat adat, perusahaan perkebunan). Namun, perusahaan pertambangan yang akan terkena dampak ERP tidak terwakili secara memadai.

Kondisi dasar dan karakteristik sosial-ekonomi yang disajikan dalam SESA berfungsi sebagai titik awal untuk analisis awal potensi risiko dan dampak dari setiap komponen dan sub-komponen program. Proses ini kemudian dilanjutkan dengan pemilihan isu lingkungan dan sosial melalui penilaian data sekunder (rencana jangka menengah dan rencana tata ruang Provinsi Jambi) dan serangkaian konsultasi pemangku kepentingan (tingkat desa, kabupaten dan provinsi).

Partisipasi dalam inisiatif REDD+ sangat relevan dengan komitmen Indonesia untuk menurunkan tingkat emisi sebesar 41 persen dengan dukungan internasional. Implementasi *Carbon Fund* sebagai ERP dimaksudkan untuk berkontribusi terhadap komitmen tersebut, yang tercermin dalam Strategi Nasional Penurunan Emisi (STRANAS). ERP akan memajukan implementasi REDD+ di tingkat nasional; akan berkontribusi pada pencapaian pengurangan emisi yang signifikan secara nasional dan internasional, membantu Indonesia mencapai target iklim dan komitmen internasionalnya; dan akan mendukung jalan Jambi menuju ekonomi hijau.

Jambi telah menghasilkan strategi provinsi untuk pengurangan emisi (Strategi dan Rencana Aksi Provinsi/SRAP) yang diturunkan dari STRANAS. Selain itu, Jambi telah menerima dukungan untuk beberapa inisiatif REDD+ seperti Berbak Carbon Initiative Project, Danish International Development Agency (DANIDA) Support for Harapan Rainforest, Community Forest Ecosystem Services Indonesia, dan UNDP Cadastral yang memberi Jambi paparan inisiatif REDD+. Intervensi-intervensi sebelumnya telah memberi provinsi ini kondisi yang memungkinkan, dokumentasi, dan pembelajaran tentang inisiatif REDD+. Sebagai konsekuensi dari pekerjaan sebelumnya, Provinsi Jambi dipandang sebagai platform strategis untuk melanjutkan dan meningkatkan REDD+.

Analisis kebijakan menunjukkan bahwa implementasi REDD+ akan lebih efektif jika ditargetkan pada kegiatan skala kecil yang tersebar yang meningkatkan stok karbon. Hal ini sejalan dengan strategi yang menyasar petani kecil di sektor perkebunan. Biaya peluang yang tinggi dapat membuat pembiayaan REDD+ tidak menarik bagi perusahaan besar, sehingga penggantian biaya peluang yang tinggi untuk sektor kehutanan dan perkebunan perlu ditangani dengan mekanisme manfaat untuk menghasilkan pembelian dari perusahaan swasta. Perusahaan swasta dapat dihubungkan dengan pasar karbon melalui sistem sewa yang dijelaskan di Bagian 3.6.4 untuk mengimbangi biaya peluang yang tinggi. Petani kecil dan perusahaan swasta diidentifikasi sebagai pemangku kepentingan dalam kegiatan REDD+ Sub Nasional Jambi yang diusulkan dalam PDO.

Rancangan ERPD untuk ER menyebutkan bahwa tujuannya adalah untuk meningkatkan pengelolaan lanskap berkelanjutan yang mengurangi emisi gas rumah kaca di Jambi. Secara khusus, ERPD akan mendorong pembangunan yang adil dan rendah karbon dengan mengatasi pemicu emisi, deforestasi, dan degradasi lahan terutama melalui penguatan kebijakan dan institusi serta menerapkan pendekatan pengelolaan lahan berkelanjutan yang dilakukan di bawah pengelolaan dan anggaran penuh dari pemerintah pusat dan provinsi. Pencapaian ERPD akan diukur melalui indikator-indikator berikut: a) Luas lahan dalam pengelolaan hutan lestari dan/atau praktik restorasi (ha); b) Penurunan Emisi GRK di Jambi (MtCO₂e); dan c) Jumlah orang yang dijangkau dengan manfaat (aset dan/atau layanan) (persen perempuan).

ERPD dan kegiatannya telah dirancang untuk mengatasi kesenjangan yang teridentifikasi dan untuk menskalakan pendekatan yang berhasil di seluruh Jambi untuk memaksimalkan pembiayaan Proyek yang tersedia melalui J-SLMP. Sebagai bagian dari proses ini, Pemerintah Indonesia, termasuk pemerintah pusat dan provinsi, melakukan analisis kegiatan yang akan mendukung ERPD. Secara khusus, kegiatan diprioritaskan berdasarkan lima kriteria: 1) Dampak yang diharapkan pada pengurangan emisi; 2) Prioritas geografis mengingat lanskap di Jambi (termasuk pendekatan perencanaan tata ruang); 3) Dampak mata pencaharian bagi masyarakat dan petani kecil; 4) Saling melengkapi dan kemampuan untuk memanfaatkan program dan inisiatif lain yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah, OMS, mitra pembangunan, masyarakat dan sektor swasta; dan 5) Nilai unik yang diberikan oleh Grup Bank Dunia pada penggunaan lahan yang berkelanjutan, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola, kebijakan, dan peraturan.

Kegiatan di bawah ERP harus menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, termasuk pertimbangan lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, dan mengikuti peraturan pemerintah dan daerah yang berlaku. Dokumen ini (SESA) disusun berdasarkan Hukum dan Peraturan Pemerintah Indonesia. Ini memperhitungkan kebijakan Bank Dunia tentang Penilaian, Manajemen Risiko, Dampak Lingkungan dan Sosial (ESS1) dari Masyarakat Adat (ESS7), dan Sumber Daya Budaya (ESS8). Ketentuan khusus yang diuraikan dalam ESMF (Environmental and Social Management Framework) akan mengulas aspek-aspek Kebijakan ESS/Bank Dunia yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Indonesia. Peraturan Pemerintah dan Daerah terkait aspek lingkungan dan sosial terkait ERP.

Berdasarkan analisis kesenjangan yang dilakukan terdapat beberapa catatan penting yang menjadi perhatian dalam dokumen ini terkait dengan kerangka peraturan meliputi:

- Kurangnya kebijakan yang mengatur atau menegakkan pengembangan ESMF untuk J-SLMP dan ERP. Pengembangan SESA, ESMF dan dokumen kerangka kerja terkait lainnya sebagian besar diamanatkan oleh lembaga donor, bukan oleh Pemerintah Indonesia. Namun, Indonesia memiliki regulasi terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau KLHS dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang kurang lebih sama dengan sistem Bank Dunia.
- Potensi yang bertentangan dengan kebijakan provinsi tentang emisi GRK (yaitu, Pembangunan Hijau/ *Visi JAMBI TUNTAS dan MANTAP*) dengan kebijakan untuk memperluas produksi kelapa sawit (1,8 juta ha). PERDA tentang tata ruang (Perda No.10/2013) tampaknya menjawab kebutuhan peningkatan produktivitas perkebunan melalui intensifikasi, serta menyeimbangkan sektor perkebunan dengan aspek ekologi. Namun, pengawasan dan penegakan hukum di lapangan tampaknya masih kurang. Demikian pula, perluasan sektor pertambangan rakyat dan ekstraktif masih terjadi. Namun dengan disetujuinya Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau Jambi, diharapkan kesenjangan ini dapat dijembatani pada aspek-aspek tertentu;
- Minyak sawit berkelanjutan diatur oleh Peraturan Menteri Pertanian No. 11/2015 tentang ISPO. Tidak ada peraturan khusus yang memberlakukan RSPO dan HCV, dan tidak ada peraturan khusus yang dapat mencegah perampasan tanah. Namun, banyak perusahaan mengikuti persyaratan RSPO dan HCV karena kepedulian untuk melakukan bisnis secara etis dan sejalan dengan perlindungan habitat;
- Kurangnya atau lemahnya kerangka peraturan tentang pembentukan meja resolusi konflik untuk menangani konflik dan perselisihan terkait kehutanan. Namun, pemerintah provinsi dan kabupaten akan membentuk tim penanggulangan konflik berdasarkan kebutuhan dan situasi faktual. Beberapa LSM juga telah mampu mendukung resolusi konflik dengan menggunakan pendekatan alternatif;
- Kurangnya atau lemahnya kerangka regulasi tentang resolusi konflik di sektor pertambangan. Saat ini mekanismenya mengacu pada peraturan agraria dan lingkungan untuk menyelesaikan konflik/sengketa di sektor pertambangan; dan
- Kurangnya regulasi tentang mekanisme bagi hasil untuk ERP. BIOCF-ISFL akan menetapkan Mekanisme dan Rencana Pembagian Manfaat yang disepakati untuk tujuan berbagi manfaat ER kepada mereka yang terlibat dalam ER.

Analisis kesenjangan dilakukan untuk melihat seberapa memadai kerangka pengaman yang ada (Pemerintah Indonesia) menangani masalah/risiko tersebut dan apakah mereka memenuhi persyaratan Bank Dunia.

Sebagai bagian dari penilaian dalam SESA, penilaian dampak lingkungan dan sosial didasarkan pada identifikasi risiko lingkungan dan sosial. Penilaian dampak dilakukan untuk mengidentifikasi jenis dan tingkat keparahan dampak (jika risiko tidak dimitigasi atau dikelola), dan untuk memberikan dasar bagi pengembangan kerangka kerja pengelolaan lingkungan dan upaya perlindungan.

SESA berfungsi untuk mengidentifikasi risiko dan potensi dampak yang terkait dengan implementasi ERP. Proses identifikasi menghasilkan serangkaian pertimbangan lingkungan dan sosial utama, yang menjadi dasar untuk mengembangkan ESMF. Analisis data spasial menunjukkan bahwa target program ER (hutan produksi, hutan lindung, konsesi perkebunan dan tutupan hutan di luar kawasan hutan) tumpang tindih dengan habitat spesies yang terancam punah, serta dengan kawasan keanekaragaman hayati utama.

Isu kebijakan utama terdiri dari kurangnya kolaborasi lintas sektoral, tumpang tindih batas, sistem administrasi lahan ganda antara pengelolaan hutan dan non-hutan, pengelolaan NKT di dalam konsesi (konsesi kehutanan dan non-kehutanan), operasionalisasi KPH, pemberdayaan petani kecil (kelapa sawit), mengatasi konflik dan perselisihan tenurial, memberikan peran yang lebih besar kepada kelompok rentan termasuk masyarakat adat termasuk pengaduan dan pembatasan akses.